



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BINSAR M. GULTOM**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **10985**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 798.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 446.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 700.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 100.488.643****F. HARTA LAINNYA****Rp. 140.000.000****Sub Total****Rp. 5.488.988.643****III. HUTANG****Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 5.488.988.643**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.